



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan/pergeseran/penyesuaian terhadap rincian obyek belanja pada obyek belanja yang sama dan antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama pada beberapa Perangkat Daerah menurut kodifikasi rekening belanja dan peruntukannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu merevisi/merubah Peraturan Walikota Langsa Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2022 untuk kedua kalinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

25. Peraturan ...

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
28. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 14);
29. Peraturan Walikota Langsa Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 969) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2022 Nomor 989);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 969) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2022 Nomor 989) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 27 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 ...

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp.244.398.463.339,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga /pihak lain/masyarakat; dan
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.26.383.679.694,- (Dua Puluh Enam Miliar Tiga ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Enam ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), bertambah sebesar Rp.9.179.000,- (Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp.26.392.858.694,- (Dua Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) dan Perangkat Daerah yang melakukan perubahan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.80.538.044.921,- (Delapan Puluh Miliar Lima ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), berkurang sebesar Rp.10.885.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu) sehingga menjadi sebesar Rp.80.527.159.921,- (Delapan Puluh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah), dan Perangkat Daerah yang melakukan perubahan adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.
- (4) Belanja pemeliharaan dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.025.649.781,- (Empat Miliar Dua Puluh Lima Juta Enam ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.17.680.844.272,- (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), bertambah sebesar Rp.1.706.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Rupiah), sehingga menjadi Rp.17.682.550.272,- (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), dan Perangkat Daerah yang melakukan perubahan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.

(6) Belanja ...

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.427.800.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.16.075.400.000,- (Enam Belas Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.95.266.044.671,- (Sembilan Puluh Lima Miliar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
2. Ketentuan lampiran I diubah dengan ringkasan Penjabaran APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan lampiran II diubah dengan Penjabaran APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun anggaran 2022 pada :
- a. Urusan Pemerintahan: 1.01 – urusan pemerintahan bidang pendidikan.
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa.
 - b. Urusan Pemerintahan: 1.02 - urusan pemerintahan bidang kesehatan.
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kota Langsa.
 - c. Urusan Pemerintahan: 2.18 – urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
Organisasi : 2.18.2.07.0.00.23 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa.

dengan rincian penjabaran APBK yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2022, dengan rincian Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa, Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa, dan Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 7 Juli 2022 M
8 Dzulhijjah 1443 H

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 7 Juli 2022 M
8 Dzulhijjah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

SAID MAHDUM MAJID

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2022 NOMOR 993

KOTA LANGSA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	141.963.940.069	141.963.940.069	0	0 %
4.1.01	Pajak Daerah	16.915.000.000	16.915.000.000	0	0 %
4.1.01.06	Pajak Hotel	870.000.000	870.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	870.000.000	870.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	870.000.000	870.000.000	0	0 %
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.250.000.000	1.250.000.000	0	0 %
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.250.000.000	1.250.000.000	0	0 %
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.250.000.000	1.250.000.000	0	0 %
4.1.01.08	Pajak Hiburan	25.000.000	25.000.000	0	0 %
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	25.000.000	25.000.000	0	0 %
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	25.000.000	25.000.000	0	0 %
4.1.01.09	Pajak Reklame	350.000.000	350.000.000	0	0 %
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	350.000.000	350.000.000	0	0 %
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	350.000.000	350.000.000	0	0 %
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	8.160.000.000	8.160.000.000	0	0 %
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	8.160.000.000	8.160.000.000	0	0 %
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	8.160.000.000	8.160.000.000	0	0 %
4.1.01.11	Pajak Parkir	20.000.000	20.000.000	0	0 %
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	20.000.000	20.000.000	0	0 %
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	20.000.000	20.000.000	0	0 %
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	80.000.000	80.000.000	0	0 %

4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	80.000.000	80.000.000	0	0 %
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	80.000.000	80.000.000	0	0 %
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000	30.000.000	0	0 %
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000	30.000.000	0	0 %
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000	30.000.000	0	0 %
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	380.000.000	380.000.000	0	0 %
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	380.000.000	380.000.000	0	0 %
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	380.000.000	380.000.000	0	0 %
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.800.000.000	1.800.000.000	0	0 %
4.1.01.15.01	PBBP2	1.800.000.000	1.800.000.000	0	0 %
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.800.000.000	1.800.000.000	0	0 %
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.950.000.000	3.950.000.000	0	0 %
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	3.950.000.000	3.950.000.000	0	0 %
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	3.950.000.000	3.950.000.000	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	5.367.100.900	5.367.100.900	0	0 %
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.748.180.900	2.748.180.900	0	0 %
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	880.480.900	880.480.900	0	0 %
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	860.280.900	860.280.900	0	0 %
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	20.200.000	20.200.000	0	0 %
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	350.000.000	350.000.000	0	0 %
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	350.000.000	350.000.000	0	0 %
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	700.000.000	700.000.000	0	0 %
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	700.000.000	700.000.000	0	0 %
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	550.000.000	550.000.000	0	0 %
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	550.000.000	550.000.000	0	0 %
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	7.700.000	7.700.000	0	0 %
4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	7.700.000	7.700.000	0	0 %
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	160.000.000	160.000.000	0	0 %
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	160.000.000	160.000.000	0	0 %
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.849.920.000	1.849.920.000	0	0 %

4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.770.000.000	1.770.000.000	0	0 %
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.043.100.000	1.043.100.000	0	0 %
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	40.000.000	40.000.000	0	0 %
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	86.900.000	86.900.000	0	0 %
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	600.000.000	600.000.000	0	0 %
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	25.550.000	25.550.000	0	0 %
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	25.550.000	25.550.000	0	0 %
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	35.770.000	35.770.000	0	0 %
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	35.770.000	35.770.000	0	0 %
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.600.000	3.600.000	0	0 %
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	3.600.000	3.600.000	0	0 %
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	15.000.000	15.000.000	0	0 %
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	15.000.000	15.000.000	0	0 %
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	769.000.000	769.000.000	0	0 %
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	650.000.000	650.000.000	0	0 %
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	650.000.000	650.000.000	0	0 %
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	92.000.000	92.000.000	0	0 %
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	92.000.000	92.000.000	0	0 %
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	27.000.000	27.000.000	0	0 %
4.1.02.03.04.0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	27.000.000	27.000.000	0	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.290.000.000	1.290.000.000	0	0 %
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.290.000.000	1.290.000.000	0	0 %
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.290.000.000	1.290.000.000	0	0 %
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.290.000.000	1.290.000.000	0	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	118.391.839.169	118.391.839.169	0	0 %
4.1.04.05	Jasa Giro	800.000.000	800.000.000	0	0 %
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	800.000.000	800.000.000	0	0 %
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	800.000.000	800.000.000	0	0 %
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	7.500.000.000	7.500.000.000	0	0 %

4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3.750.000.000	3.750.000.000	0	0 %
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3.750.000.000	3.750.000.000	0	0 %
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	3.750.000.000	3.750.000.000	0	0 %
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	3.750.000.000	3.750.000.000	0	0 %
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	98.852.182.671	98.852.182.671	0	0 %
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	98.852.182.671	98.852.182.671	0	0 %
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	98.852.182.671	98.852.182.671	0	0 %
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	4.739.656.498	4.739.656.498	0	0 %
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.739.656.498	4.739.656.498	0	0 %
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.739.656.498	4.739.656.498	0	0 %
4.1.04.22	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0 %
4.1.04.22.01	Pendapatan Zakat	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0 %
4.1.04.22.01.0001	Pendapatan Zakat	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0 %
4.1.04.22.01.0002	Pendapatan Infaq	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	678.691.278.643	678.691.278.643	0	0 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	580.004.620.000	580.004.620.000	0	0 %
4.2.01.01	Dana Perimbangan	526.848.484.000	526.848.484.000	0	0 %
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	14.447.185.000	14.447.185.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.073.800.000	6.073.800.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.018.493.000	5.018.493.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	176.996.000	176.996.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	525.790.000	525.790.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	16.265.000	16.265.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	701.109.000	701.109.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	15.906.000	15.906.000	0	0 %
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000	1.918.826.000	0	0 %
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	407.519.092.000	407.519.092.000	0	0 %
4.2.01.01.02.0001	DAU	407.519.092.000	407.519.092.000	0	0 %
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	56.737.085.000	56.737.085.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.808.368.000	1.808.368.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	13.244.644.000	13.244.644.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	11.813.187.000	11.813.187.000	0	0 %

4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	3.323.545.000	3.323.545.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	1.619.642.000	1.619.642.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	578.527.000	578.527.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.161.423.000	1.161.423.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	8.388.806.000	8.388.806.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	5.339.161.000	5.339.161.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	3.356.301.000	3.356.301.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	6.103.481.000	6.103.481.000	0	0 %
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	48.145.122.000	48.145.122.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	33.848.030.000	33.848.030.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	969.000.000	969.000.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.866.800.000	2.866.800.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	987.100.000	987.100.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	700.000.000	700.000.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.624.809.000	4.624.809.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000	406.876.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	35.639.000	35.639.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.849.873.000	1.849.873.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	404.200.000	404.200.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	369.695.000	369.695.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000	451.800.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	631.300.000	631.300.000	0	0 %
4.2.01.05	Dana Desa	53.156.136.000	53.156.136.000	0	0 %
4.2.01.05.01	Dana Desa	53.156.136.000	53.156.136.000	0	0 %
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	53.156.136.000	53.156.136.000	0	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	98.686.658.643	98.686.658.643	0	0 %
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	20.508.728.665	20.508.728.665	0	0 %
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	20.508.728.665	20.508.728.665	0	0 %
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.324.431.994	4.324.431.994	0	0 %
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.725.828.234	2.725.828.234	0	0 %
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.691.835.209	7.691.835.209	0	0 %

4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	27.924.394	27.924.394	0	0 %
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	5.738.708.834	5.738.708.834	0	0 %
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	78.177.929.978	78.177.929.978	0	0 %
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	78.177.929.978	78.177.929.978	0	0 %
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	78.177.929.978	78.177.929.978	0	0 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.714.300.000	20.714.300.000	0	0 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.714.300.000	20.714.300.000	0	0 %
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	20.714.300.000	20.714.300.000	0	0 %
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	20.714.300.000	20.714.300.000	0	0 %
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	20.714.300.000	20.714.300.000	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	841.369.518.712	841.369.518.712	0	0 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	625.647.403.344	625.647.403.344	0	0 %
5.1.01	Belanja Pegawai	334.577.082.962	334.577.082.962	0	0 %
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	241.748.097.779	241.748.097.779	0	0 %
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	177.797.043.396	177.687.106.595	(109.936.800)	0 %
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	174.973.305.545	174.863.368.745	(109.936.800)	0 %
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	2.823.737.851	2.823.737.851	0	0 %
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	15.221.054.346	15.221.054.346	0	0 %
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14.927.259.265	14.927.259.265	0	0 %
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	293.795.081	293.795.081	0	0 %
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.543.005.650	5.543.005.650	0	0 %
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.543.005.650	5.543.005.650	0	0 %
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.611.280.590	11.705.734.090	94.453.500	1 %
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.578.914.130	11.565.620.830	(13.293.300)	0 %
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	32.366.460	140.113.260	107.746.800	333 %
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.445.652.750	3.461.136.050	15.483.300	0 %
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.228.674.450	3.244.157.750	15.483.300	0 %
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	216.978.300	216.978.300	0	0 %
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.231.055.595	10.231.055.595	0	0 %
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	9.898.721.760	9.898.721.760	0	0 %

5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	332.333.835	332.333.835	0	0 %
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.182.186.913	1.182.186.913	0	0 %
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.149.281.390	1.149.281.390	0	0 %
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	32.905.523	32.905.523	0	0 %
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	29.783.176	29.783.176	0	0 %
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.257.720	29.257.720	0	0 %
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	525.456	525.456	0	0 %
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	14.186.574.136	14.186.574.136	0	0 %
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	14.115.161.417	14.115.161.417	0	0 %
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	71.412.719	71.412.719	0	0 %
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	392.996.411	392.996.411	0	0 %
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	386.414.077	386.414.077	0	0 %
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	6.582.334	6.582.334	0	0 %
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.146.289.284	1.146.289.284	0	0 %
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.127.041.054	1.127.041.054	0	0 %
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	19.248.230	19.248.230	0	0 %
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	961.175.532	961.175.532	0	0 %
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	945.587.865	945.587.865	0	0 %
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	15.587.667	15.587.667	0	0 %
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	46.015.370.128	46.015.370.128	0	0 %
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	15.627.637.708	15.762.487.055	134.849.347	1 %
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	15.627.637.708	15.672.035.159	44.397.451	0 %
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	0	90.451.896	90.451.896	100 %
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.009.648.069	4.009.648.069	0	0 %
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4.009.648.069	3.986.130.621	(23.517.448)	1 %
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	0	23.517.448	23.517.448	100 %
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	56.177.617	56.177.617	0	0 %
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	56.177.617	56.177.617	0	0 %
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	26.321.906.734	26.187.057.387	(134.849.347)	1 %
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	26.321.906.734	26.012.183.715	(309.723.019)	1 %
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	0	174.873.672	174.873.672	100 %
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	37.704.170.000	37.704.170.000	0	0 %

5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	732.500.000	732.500.000	0	0 %
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	732.500.000	732.500.000	0	0 %
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	33.848.030.000	33.848.030.000	0	0 %
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	33.848.030.000	33.848.030.000	0	0 %
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	969.000.000	969.000.000	0	0 %
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	969.000.000	969.000.000	0	0 %
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.154.640.000	2.154.640.000	0	0 %
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.144.920.000	2.144.920.000	0	0 %
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9.720.000	9.720.000	0	0 %
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.400.415.050	8.400.415.050	0	0 %
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000	561.540.000	0	0 %
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000	561.540.000	0	0 %
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600	78.615.600	0	0 %
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600	78.615.600	0	0 %
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	97.694.000	97.694.000	0	0 %
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	97.694.000	97.694.000	0	0 %
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.220.500	48.220.500	0	0 %
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	48.220.500	48.220.500	0	0 %
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.359.000	814.359.000	0	0 %
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.359.000	814.359.000	0	0 %
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	85.899.450	85.899.450	0	0 %
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	85.899.450	85.899.450	0	0 %
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.413.900	10.413.900	0	0 %
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	10.413.900	10.413.900	0	0 %
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000	1.890.000.000	0	0 %
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000	1.890.000.000	0	0 %
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	157.500.000	157.500.000	0	0 %
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	157.500.000	157.500.000	0	0 %
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	270.000.000	270.000.000	0	0 %
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	270.000.000	270.000.000	0	0 %
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.666.172.600	1.666.172.600	0	0 %
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	83.202.600	83.202.600	0	0 %

5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	159.170.000	159.170.000	0	0 %
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	11.400.000	11.400.000	0	0 %
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.412.400.000	1.412.400.000	0	0 %
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.720.000.000	2.720.000.000	0	0 %
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.720.000.000	2.720.000.000	0	0 %
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	198.150.005	198.150.005	0	0 %
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000	55.965.000	0	0 %
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000	55.965.000	0	0 %
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.925.500	9.925.500	0	0 %
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.925.500	9.925.500	0	0 %
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.561.500	100.561.500	0	0 %
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.561.500	100.561.500	0	0 %
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	17.729.712	17.729.712	0	0 %
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	17.729.712	17.729.712	0	0 %
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.532.963	3.532.963	0	0 %
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.532.963	3.532.963	0	0 %
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	235.330	235.330	0	0 %
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	235.330	235.330	0	0 %
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.200.000	8.200.000	0	0 %
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.200.000	8.200.000	0	0 %
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	600.000	600.000	0	0 %
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	600.000	600.000	0	0 %
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.400.000	1.400.000	0	0 %
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.400.000	1.400.000	0	0 %
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000	510.880.000	0	0 %
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000	110.880.000	0	0 %
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000	110.880.000	0	0 %
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000	400.000.000	0	0 %
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000	400.000.000	0	0 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.398.463.339	244.398.463.339	0	0 %
5.1.02.01	Belanja Barang	26.383.679.694	26.392.858.694	9.179.000	0 %
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	26.383.679.694	26.392.858.694	9.179.000	0 %

5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.167.903.150	1.167.903.150	0	0 %
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	277.081.415	277.081.415	0	0 %
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.200.437.642	2.200.437.642	0	0 %
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	276.175.050	276.175.050	0	0 %
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.613.600	2.613.600	0	0 %
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	54.830.000	54.830.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	8.506.000	8.506.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.908.437.429	2.908.437.429	0	0 %
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	126.382.806	126.382.806	0	0 %
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	138.600.000	138.600.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	40.000.000	40.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	3.565.000	3.565.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.769.194.600	2.772.495.480	3.300.880	0 %
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.727.087.007	3.732.965.127	5.878.120	0 %
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	254.870.000	254.870.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	670.149.615	670.149.615	0	0 %
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	56.062.500	56.062.500	0	0 %
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	548.640.000	548.640.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.300.000	1.300.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	656.049.006	656.049.006	0	0 %
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	920.824.924	920.824.924	0	0 %
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	285.039.000	285.039.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	45.002.000	45.002.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.694.052.750	1.694.052.750	0	0 %
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.641.945.000	2.641.945.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	138.240.000	138.240.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	123.900.000	123.900.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	22.500.000	22.500.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.574.626.200	3.574.626.200	0	0 %
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	17.645.000	17.645.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	16.000.000	16.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	449.000.000	449.000.000	0	0 %

5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	6.000.000	6.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (P5R)	90.000.000	90.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	56.250.000	56.250.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	1.400.000	1.400.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	268.000.000	268.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	145.370.000	145.370.000	0	0 %
5.1.02.02	Belanja Jasa	80.538.044.921	80.527.159.921	(10.885.000)	0 %
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	73.938.725.173	73.934.725.173	(4.000.000)	0 %
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.749.700.000	2.745.700.000	(4.000.000)	0 %
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.460.700.000	2.460.700.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	306.500.000	306.500.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	879.600.000	879.600.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	763.200.000	763.200.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	12.702.609.863	12.702.609.863	0	0 %
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	9.600.000	9.600.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	368.100.000	368.100.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6.855.840.000	6.855.840.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.194.520.000	3.194.520.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	249.000.000	249.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	858.000.000	858.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	153.600.000	153.600.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	346.800.000	346.800.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.039.450.000	7.039.450.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	334.750.000	334.750.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.500.350.000	2.500.350.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.841.779.240	3.841.779.240	0	0 %
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.221.880.000	9.221.880.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.595.540.000	2.595.540.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	234.600.000	234.600.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.016.800.000	1.016.800.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	30.600.000	30.600.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	106.440.000	106.440.000	0	0 %

5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	18.800.000	18.800.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	445.200.000	445.200.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	9.265.600	9.265.600	0	0 %
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	25.500.000	25.500.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	167.500.000	167.500.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	20.792.000	20.792.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	100.000.000	100.000.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.290.040.000	1.290.040.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	43.200.000	43.200.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	222.900.000	222.900.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	280.275.480	385.044.780	104.769.300	37 %
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	8.579.307.990	8.474.538.690	(104.769.300)	1 %
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	189.835.000	189.835.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.245.700.000	1.245.700.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	155.770.000	155.770.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	472.980.000	472.980.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	351.700.000	351.700.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.287.704.248	1.287.704.248	0	0 %
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	670.883.448	670.883.448	0	0 %
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	531.820.800	531.820.800	0	0 %
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	85.000.000	85.000.000	0	0 %
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	752.304.600	752.304.600	0	0 %
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	287.727.600	287.727.600	0	0 %
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	9.262.000	9.262.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	61.100.000	61.100.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	294.190.000	294.190.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	100.025.000	100.025.000	0	0 %
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	977.635.900	977.635.900	0	0 %
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	407.000.000	407.000.000	0	0 %
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	528.256.900	528.256.900	0	0 %
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	42.379.000	42.379.000	0	0 %

5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	45.000.000	45.000.000	0	0 %
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	45.000.000	45.000.000	0	0 %
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	900.000.000	900.000.000	0	0 %
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	900.000.000	900.000.000	0	0 %
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	60.000.000	60.000.000	0	0 %
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	60.000.000	60.000.000	0	0 %
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	300.000.000	300.000.000	0	0 %
5.1.02.02.10.0019	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Perumahan Rakyat	300.000.000	300.000.000	0	0 %
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	191.000.000	191.000.000	0	0 %
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	151.000.000	151.000.000	0	0 %
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	40.000.000	40.000.000	0	0 %
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.085.675.000	2.078.790.000	(6.885.000)	0 %
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.173.455.000	1.173.455.000	0	0 %
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	498.575.000	496.790.000	(1.785.000)	0 %
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	413.645.000	408.545.000	(5.100.000)	1 %
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4.025.649.781	4.025.649.781	0	0 %
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.934.636.700	2.934.636.700	0	0 %
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	100.000.000	100.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	50.000.000	50.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	284.599.200	284.599.200	0	0 %
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.305.618.400	1.305.618.400	0	0 %
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	330.423.600	330.423.600	0	0 %
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	44.721.600	44.721.600	0	0 %
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	226.447.000	226.447.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	380.498.500	380.498.500	0	0 %
5.1.02.03.02.0131	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	1.689.600	1.689.600	0	0 %
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio Peralatan Studio Video dan Film	20.000.000	20.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	145.461.200	145.461.200	0	0 %
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	45.177.600	45.177.600	0	0 %
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.080.666.481	1.080.666.481	0	0 %
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.037.666.481	1.037.666.481	0	0 %
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	43.000.000	43.000.000	0	0 %

5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.346.600	10.346.600	0	0 %
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	10.346.600	10.346.600	0	0 %
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	17.680.844.272	17.682.550.272	1.706.000	0 %
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.680.844.272	17.682.550.272	1.706.000	0 %
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.260.165.272	10.243.343.272	(16.822.000)	0 %
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.420.679.000	7.439.207.000	18.528.000	0 %
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.427.800.000	4.427.800.000	0	0 %
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.427.800.000	4.427.800.000	0	0 %
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.132.800.000	1.132.800.000	0	0 %
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	3.295.000.000	3.295.000.000	0	0 %
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.076.400.000	16.076.400.000	0	0 %
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.076.400.000	16.076.400.000	0	0 %
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.076.400.000	16.076.400.000	0	0 %
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	95.266.044.671	95.266.044.671	0	0 %
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	95.266.044.671	95.266.044.671	0	0 %
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	95.266.044.671	95.266.044.671	0	0 %
5.1.05	Belanja Hibah	24.517.035.022	24.517.035.022	0	0 %
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	23.741.565.004	23.741.565.004	0	0 %
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.301.275.000	5.191.396.000	(1.109.879.000)	18 %
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.301.275.000	5.191.396.000	(1.109.879.000)	18 %
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.600.000.000	4.650.000.000	50.000.000	1 %
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.600.000.000	4.650.000.000	50.000.000	1 %
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	12.840.290.004	13.900.169.004	1.059.879.000	8 %
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.235.000.000	5.235.000.000	0	0 %
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.605.290.004	8.665.169.004	1.059.879.000	14 %
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	775.470.018	775.470.018	0	0 %
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	775.470.018	775.470.018	0	0 %
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	775.470.018	775.470.018	0	0 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	22.154.822.021	22.154.822.021	0	0 %
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	14.092.144.521	14.092.144.521	0	0 %

5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	488.480.000	488.480.000	0	0 %
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	488.480.000	488.480.000	0	0 %
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	13.603.664.521	13.603.664.521	0	0 %
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	13.603.664.521	13.603.664.521	0	0 %
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	7.283.747.500	7.283.747.500	0	0 %
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	4.222.594.000	4.222.594.000	0	0 %
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	4.222.594.000	4.222.594.000	0	0 %
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	3.061.153.500	3.061.153.500	0	0 %
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	3.061.153.500	3.061.153.500	0	0 %
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	778.930.000	778.930.000	0	0 %
5.1.06.04.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	778.930.000	778.930.000	0	0 %
5.1.06.04.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	778.930.000	778.930.000	0	0 %
5.2	BELANJA MODAL	118.601.570.402	118.601.570.402	0	0 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.140.000.000	2.140.000.000	0	0 %
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	2.140.000.000	2.140.000.000	0	0 %
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	680.000.000	680.000.000	0	0 %
5.2.01.01.01.0006	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	100.000.000	100.000.000	0	0 %
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	580.000.000	580.000.000	0	0 %
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	1.460.000.000	1.460.000.000	0	0 %
5.2.01.01.03.0001	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga	580.000.000	580.000.000	0	0 %
5.2.01.01.03.0008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	880.000.000	880.000.000	0	0 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.498.561.784	24.498.561.784	0	0 %
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	25.000.000	25.000.000	0	0 %
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	25.000.000	25.000.000	0	0 %
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	25.000.000	25.000.000	0	0 %
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	11.964.000	11.964.000	0	0 %
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	11.964.000	11.964.000	0	0 %
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	7.404.000	7.404.000	0	0 %
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	4.560.000	4.560.000	0	0 %
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.782.779.110	10.782.779.110	0	0 %

5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	11.064.200	11.064.200	0	0 %
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	11.064.200	11.064.200	0	0 %
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.614.769.364	10.614.769.364	0	0 %
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	10.258.756.464	10.258.756.464	0	0 %
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	86.989.400	86.989.400	0	0 %
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	15.116.500	15.116.500	0	0 %
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	253.907.000	253.907.000	0	0 %
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	156.945.546	156.945.546	0	0 %
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	156.945.546	156.945.546	0	0 %
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	275.329.800	275.329.800	0	0 %
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	250.329.800	250.329.800	0	0 %
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	44.249.000	44.249.000	0	0 %
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	123.565.800	123.565.800	0	0 %
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	77.075.000	77.075.000	0	0 %
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	5.440.000	5.440.000	0	0 %
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	10.000.000	10.000.000	0	0 %
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	10.000.000	10.000.000	0	0 %
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	15.000.000	15.000.000	0	0 %
5.2.02.06.03.0048	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	15.000.000	15.000.000	0	0 %
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.895.710.674	1.895.710.674	0	0 %
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.895.710.674	1.895.710.674	0	0 %
5.2.02.07.02.0004	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	25.520.000	25.520.000	0	0 %
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.870.190.674	1.870.190.674	0	0 %
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	817.610.300	817.610.300	0	0 %
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	756.708.000	756.708.000	0	0 %
5.2.02.08.01.0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	243.608.000	243.608.000	0	0 %
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	247.700.000	247.700.000	0	0 %
5.2.02.08.01.0020	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	265.400.000	265.400.000	0	0 %
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	60.902.300	60.902.300	0	0 %
5.2.02.08.03.0006	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	35.142.300	35.142.300	0	0 %
5.2.02.08.03.0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	25.000.000	25.000.000	0	0 %
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	760.000	760.000	0	0 %

5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.575.929.900	3.575.929.900	0	0 %
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.154.212.700	3.154.212.700	0	0 %
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	894.212.700	894.212.700	0	0 %
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	2.260.000.000	2.260.000.000	0	0 %
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	421.717.200	421.717.200	0	0 %
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	83.601.400	83.601.400	0	0 %
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	66.180.000	66.180.000	0	0 %
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	271.935.800	271.935.800	0	0 %
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	9.000.000	9.000.000	0	0 %
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	9.000.000	9.000.000	0	0 %
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	9.000.000	9.000.000	0	0 %
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	500.000.000	500.000.000	0	0 %
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	500.000.000	500.000.000	0	0 %
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	500.000.000	500.000.000	0	0 %
5.2.02.BB	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.019.100.000	4.019.100.000	0	0 %
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.019.100.000	4.019.100.000	0	0 %
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.019.100.000	4.019.100.000	0	0 %
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.586.138.000	2.586.138.000	0	0 %
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.586.138.000	2.586.138.000	0	0 %
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.586.138.000	2.586.138.000	0	0 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.633.919.435	50.633.919.435	0	0 %
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	41.933.433.998	41.933.433.998	0	0 %
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	38.447.658.998	38.447.658.998	0	0 %
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	3.639.523.590	3.639.523.590	0	0 %
5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	5.343.847.000	5.343.847.000	0	0 %
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	6.185.179.761	6.185.179.761	0	0 %
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	180.000.000	180.000.000	0	0 %
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	13.226.262.340	13.226.262.340	0	0 %
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	190.000.001	190.000.001	0	0 %
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	95.857.000	95.857.000	0	0 %
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	4.986.989.306	4.986.989.306	0	0 %

5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	900.000.000	900.000.000	0	0 %
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	500.000.000	500.000.000	0	0 %
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	1.600.000.000	1.600.000.000	0	0 %
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000	100.000.000	0	0 %
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.485.775.000	3.485.775.000	0	0 %
5.2.03.01.02.0010	Belanja Modal Panti Asuhan	500.000.000	500.000.000	0	0 %
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	2.985.775.000	2.985.775.000	0	0 %
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	7.700.485.437	7.700.485.437	0	0 %
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	7.700.485.437	7.700.485.437	0	0 %
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	7.700.485.437	7.700.485.437	0	0 %
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	41.316.189.183	41.316.189.183	0	0 %
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	30.391.629.311	30.391.629.311	0	0 %
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	28.451.629.310	28.451.629.310	0	0 %
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	27.109.331.252	27.109.331.252	0	0 %
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	1.342.298.058	1.342.298.058	0	0 %
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.940.000.001	1.940.000.001	0	0 %
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	1.925.000.000	1.925.000.000	0	0 %
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	15.000.001	15.000.001	0	0 %
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	9.128.281.752	9.128.281.752	0	0 %
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	4.773.083.202	4.773.083.202	0	0 %
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	4.773.083.202	4.773.083.202	0	0 %
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	700.000.000	700.000.000	0	0 %
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	700.000.000	700.000.000	0	0 %
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	300.000.000	300.000.000	0	0 %
5.2.04.02.05.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	300.000.000	300.000.000	0	0 %
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	3.355.198.550	3.355.198.550	0	0 %
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	3.355.198.550	3.355.198.550	0	0 %
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.796.278.120	1.796.278.120	0	0 %
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	1.696.278.120	1.696.278.120	0	0 %

5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	1.696.278.120	1.696.278.120	0	0 %
5.2.04.03.04	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	100.000.000	100.000.000	0	0 %
5.2.04.03.04.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	100.000.000	100.000.000	0	0 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.900.000	12.900.000	0	0 %
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	12.900.000	12.900.000	0	0 %
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	12.900.000	12.900.000	0	0 %
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	5.700.000	5.700.000	0	0 %
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	2.400.000	2.400.000	0	0 %
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	4.800.000	4.800.000	0	0 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
5.4	BELANJA TRANSFER	97.580.973.790	97.580.973.790	0	0 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.228.210.090	2.228.210.090	0	0 %
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.691.500.000	1.691.500.000	0	0 %
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.691.500.000	1.691.500.000	0	0 %
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.691.500.000	1.691.500.000	0	0 %
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	536.710.090	536.710.090	0	0 %
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	536.710.090	536.710.090	0	0 %
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	536.710.090	536.710.090	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	95.352.763.700	95.352.763.700	0	0 %
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	95.352.763.700	95.352.763.700	0	0 %
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	95.352.763.700	95.352.763.700	0	0 %
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	95.352.763.700	95.352.763.700	0	0 %
	Jumlah Belanja	843.829.947.536	843.829.947.536	0	0 %
	Total Surplus/(Defisit)	(2.460.428.824)	(2.460.428.824)	0	0 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2.960.428.824	2.960.428.824	0	0 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.960.428.824	2.960.428.824	0	0 %

6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	2.960.428.824	2.960.428.824	0	0 %
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	2.960.428.824	2.960.428.824	0	0 %
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	2.960.428.824	2.960.428.824	0	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	2.960.428.824	2.960.428.824	0	0 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	500.000.000	500.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000	500.000.000	0	0 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	500.000.000	500.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	500.000.000	500.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	500.000.000	500.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000	500.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	2.460.428.824	2.460.428.824	0	0 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Walikota Langsa,



USMAN ABDULLAH